



Analisis Kinerja Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Azizahtut Ta'zhiyah¹, Lilis Ardini²

¹Prodi Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Email : azizahtutt@gmail.com, lilisardini_elearning@stiesia.ac.id

ABSTRACT

This research aims to assess the performance of the Sidoarjo Regency government in terms of the Regional Financial Report for the period 2022 and 2021. The object and research data used is the Sidoarjo Regency Government Financial Report for the period 2022 with a comparison of 2021. This research is a qualitative descriptive research with analysis of the Regional Financial Report. This comparative analysis was carried out because in the previous year, namely 2021, fraud behavior regarding government funds was discovered. The results of the existing analysis show that the performance of the Sidoarjo Regency government in 2022 has experienced significant improvements compared to 2021.

Keywords : *Financial Report, Government, Performance, Sidoarjo*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari Laporan Keuangan Daerah periode 2022 dan 2021. Objek dan data penelitian yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo periode 2022 dengan perbandingan 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis Laporan Keuangan Daerah. Analisis perbandingan ini dilakukan karena pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2021, ditemukan perilaku korupsi terhadap dana pemerintah. Hasil dari analisis yang ada menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2022 sudah mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan di tahun 2021.

Kata kunci : Laporan Keuangan, Pemerintah, Kinerja, Sidoarjo

1. PENDAHULUAN

Informasi keuangan suatu entitas khususnya entitas sektor publik memberikan informasi penting mengenai kinerja dalam satu tahun, tentunya penyajian dan juga pelaporan ini haruslah andal dan akuntabel. Pelaporan ini juga yang nantinya akan menjadikan ukuran dalam menilai kinerja pemerintahan (Sulastri et al., 2022)

Kebutuhan akan akuntabilitas pemerintahan sector publik menjadi tuntutan masyarakat saat ini sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good governance* (Yanti et al., 2020). Dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah. dituntut untuk melaksanakan. pengelolaan. keuangan. secara.transparan.dan.akuntabel menurut

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang. Pemerintah. Daerah, Laporan Keuangan merupakan wujud. pertanggungjawaban. pemerintah daerah atas pengelolaan. keuangan. daerah. selama.satu. tahun anggaran. Dalam. pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional. pemerintah. dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010. Tentang. Standar. Akuntansi Pemerintah. yang. sudah. memuat. berbagai. persyaratan. dalam menyajikan. informasi laporan keuangan yang berkualitas.diantaranya. relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Seiring berjalannya waktu kemudahan akses laporan keuangan daerah dapat dilihat masyarakat melalui media digital maupun website pemerintahan daerah masing-masing (Amin & Anwar, 2020). Laporan keuangan ini yang nantinya menjembatani akuntabilitas publik. Sehingga pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan yang berkualitas baik (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah juga harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan (Rizki Afri Mulia, 2018).

Kabupaten Sidoarjo menjadi pusat perhatian penulis untuk dianalisis lebih lanjut, melihat dan menilai bagaimana kinerja pemerintahan melalui laporan keuangan daerah yang dilaporkan dan dipublikasikan ke publik. Ditambah dengan fakta dan berita di media bahwasanya mantan Bupati Sidoarjo diduga melakukan tindakan korupsi kurang lebih 15 Milyar(sumber:<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/10/didakwa-terimagratifikasi-rp-44-miliar-saiful-ilah-keberatan>). Mantan Bupati yang menjabat 2 periode yaitu dari tahun 2010 sd 2021 lalu melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakili di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (sumber: <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3004-kpk-kembali-tetapkan-bupati-sidoarjo-sebagai-tersangka-gratifikasi>). Dapat dikatakan dengan adanya hal tersebut sudah terjadi penyelewengan sehingga secara tidak langsung pertanggungjawaban dan kinerja pemerintah khususnya Kabupaten Sidoarjo perlu dipertanyakan misalnya dengan melihat bagaimana kualitas laporan keuangan yang dilaporkan. Kualitas Laporan Pemerintahan Daerah sendiri yang baik atau biasa disebut *good governance* tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum. Namun, kualitas tata kelola yang baik tergantung pada faktor-faktor lain seperti efisiensi dan

visi strategis (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Sehingga dari paparan tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu terkait “Bagaimana analisis kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo untuk menilai kinerja pada periode 2021 sd 2022?”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan merupakan hubungan antara dua pihak yaitu agen dan principal. Dalam pemerintahan, teori keagenan yang dimaksud adalah pemerintah sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal. Teori keagenan (*agency theory*) sendiri terkait aksi pemerintah daerah dalam memberikan informasi bagaimana keuangannya dikelola sesuai target yang telah direncanakan sebagai wujud akuntabilitas (Amin & Anwar, 2020). Teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan kepercayaan masyarakat akan kemampuan pemerintah daerah menyelesaikan kewajibannya membuat pertanggungjawaban keuangan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan rakyatnya.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban termasuk juga akuntabilitas atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan sendiri yang nantinya akan bermanfaat dalam pemberian informasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk juga masyarakat selaku public (Armyanti & Handayani, 2019). Berdasarkan PP 71/2010 laporan keuangan daerah harusnya memiliki 4 karakteristik yaitu , dapat dipahami, dibandingkan, relevan dan andal. (Maydiyanti et al., 2020) menyatakan kualitas Laporan keuangan daerah haruslah menyajikan informasi yang dapat dipahami mampu dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan sendiri juga dapat digunakan sebagai alat untuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan. Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan karakteristik kualitatif laporan yang menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan informasi lain pemerintah daerah yang dihasilkan dari akun-akun yang ada (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Kualitas pelaporan keuangan difungsikan sebagai tanggung jawab atau kewajiban laporan keuangan yang dilaporkan. Secara umum, kualitas laporan keuangan daerah merupakan ciri kualitatif dari proses akuntansi, dimana akuntabilitas dan transparansi saling mempengaruhi.

2.3 *Good governance*

(Yanti et al., 2020) *good governance* merupakan konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. *good governance* adalah

suatu hubungan yang berkesinambungan, bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran. Transparansi pelaporan keuangan daerah merupakan salah satu wujud penerapan *good governance*. Di Indonesia penerapan *good governance* masih belum dirasa optimal karena masih banyak ditemukan penyelewengan-penyelewengan salah satunya korupsi dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif terkait analisis Laporan Keuangan Daerah. Data informasi yang diambil adalah data sekunder yaitu Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang didapatkan melalui website Kabupaten Sidoarjo dengan periode waktu 2021-2022.

4. HASIL DAN DISKUSI PENELITIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

A. Laporan Realisasi APBD

Pada Laporan Realisasi APBD yang disajikan di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dengan selisih sebanyak Rp 164.786.103.626,22. Namun di sisi lain pada belanja sendiri di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 86.188.139.211,14 dari tahun 2021. Sehingga defisit anggaran di tahun 2022 pun juga ikut menurun dibandingkan tahun 2021. Walaupun pada tahun 2021 pendapatan yang ada tinggi namun pada belanja juga meningkat signifikan. Sedangkan tahun 2022 antara anggaran pendapatan dan juga realisasi ternyata mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 52.650.384.847,19. Dalam Laporan Realisasi APBD ini dapat disimpulkan bahwa Realisasi APBD di tahun 2022 sudah cukup baik dibandingkan di tahun 2021.

B. Neraca

Pada laporan neraca yang disajikan di tahun 2022, jumlah aset yang dilaporkan lebih banyak sebesar Rp 777.849.388.286,60 dibandingkan di tahun 2021.

C. Laporan Operasional

Laporan Operasional 2022 yang dilaporkan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding pada tahun 2021. Pada sisi pendapatan yaitu pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp 36.053.686.181,77 dari tahun 2021. Selain itu terdapat pula tambahan pada pendapatan transfer yaitu pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dimana di tahun sebelumnya tidak ada. Adapun pada pendapatan hibah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 73.812.373.745,62 dari tahun sebelumnya. Namun pada beban, yaitu beban pegawai mengalami penurunan sangat signifikan sebesar Rp 146.761.997.857,26 dibandingkan tahun sebelumnya di 2021. Angka ini lumayan sangat besar yaitu mengalami penurunan senilai 9,06%. Selain itu pada beban subsidi juga mengalami penurunan sebesar Rp 2.134.412.002,00 dari tahun 2021 dan juga pada beban tak terduga di 2022 yang mengalami penurunan sangat drastis yaitu sebesar Rp 43.237.507.030,07 dari tahun sebelumnya. Sehingga defisit di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 70.876.893.641,72 dibanding tahun 2021.

D. Laporan Arus Kas

Pada laporan arus kas yang dilaporkan pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah arus kas masuk dibandingkan tahun 2021. Namun itu sebanding dengan arus kas keluar yang lebih sedikit dibandingkan di tahun 2021. Sehingga saldo akhir kas di tahun 2021 lebih sedikit jika dibandingkan saldo akhir di tahun 2022.

E. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pada laporan perubahan saldo anggaran lebih, di saldo anggaran lebih akhir di tahun 2022 yang dilaporkan adalah Rp 494.877.999.184,63. Hal ini sangat berbeda jauh dengan tahun 2021 dimana saldo anggaran lebih akhir yang dilaporkan adalah sebesar Rp 840.996.530.211,75.

F. Laporan Perubahan Ekuitas

Karena pada laporan neraca 2022, jumlah aset yang dilaporkan lebih banyak dari tahun 2021. Otomatis laporan perubahan ekuitas yang ada di tahun 2022 pun juga sama. Di tahun 2022 Ekuitas akhir yang dilaporkan adalah sebesar Rp 22.480.714.232.990,30.

G. Catatan Atas Laporan Keuangan.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 62.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023. BPK

menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dengan beberapa pokok temuan. Adapun adalah sebagai berikut:

1. Kurang penetapan atas lima jenis pajak minimal sebesar Rp416.064.746,95 dan terdapat 427 objek pajak belum terdata sehingga daerah belum menerima pendapatan minimal sebesar Rp122.164.458,00.
2. Pengelolaan pendapatan hasil kerja sama pemanfaatan aset rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas P2CKTR) dan Pemerintah Desa Tambaksawah tidak memadai sehingga daerah belum menerima bagi hasil seharusnya.
3. Hasil kerja sama pengelolaan parkir tidak menguntungkan daerah sehingga pendapatan atas kerja sama tersebut tidak disetor ke kas daerah.
4. Kelebihan bayar pada tiga OPD akibat kekurangan volume pekerjaan atas enam paket pekerjaan sebesar Rp585.321.877,30 dan harga satuan penawaran timpang atas dua paket pekerjaan sebesar Rp306.440.306,53, serta denda keterlambatan pada satu OPD belum dikenakan atas dua paket pekerjaan sebesar Rp320.908.255,40.
5. Pengelolaan Piutang PBB P2 tidak tertib sehingga database wajib pajak dan objek pajak tidak mutakhir dan tidak valid.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

5. KESIMPULAN dan SARAN

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 yang dilaporkan dan dipublikasikan ke masyarakat dapat diketahui bahwasanya kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2022 sudah cukup mengalami perbaikan. Dilihat dari defisit anggaran yang berkurang dari tahun sebelumnya serta di sisi aset yang dilaporkan juga bertambah. Dari hasil audit yang disajikan di Catatan Atas Laporan Keuangan mungkin perlu diperbaiki dan

ditingkatkan lagi untuk pengendalian internal. Karena terbukti di tahun 2021 lalu ditemukan kasus penyelewengan yang bahkan dilakukan sendiri oleh Pejabat Daerahnya. Jadi untuk mewujudkan *good governance* juga perlu didukung oleh perbaikan kinerja internal dari pemerintah itu sendiri dengan memaksimalkan kinerja secara efektif dan efisien dan dapat mengurangi tindak penyelewengan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A., & Anwar, A. (2020). Dimensi Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 223–230. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.223-230>
- Armyanti, S. N., & Handayani, N. (2019). Faktor - Faktor yang Berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Kabupaten Sidoarjo. *E-Jurnal Akuntansi*, 2183.
- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 8
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Maydiyanti, S., Annie, M. P., & Della, H. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Factors That Affect The Quality Of The Financial Statements Of The City Government Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 69–78. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Rizki Afri Mulia. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 1–15.
- Sulastri, D., Abdullah, A. ‘Ala, Fathir, K., & Casilam, C. (2022). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(2), 80–88. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i2.173>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>
- Amin, A., & Anwar, A. (2020). Dimensi Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 223–230. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.223-230>

- Armyanti, S. N., & Handayani, N. (2019). Faktor - Faktor yang Berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Kabupaten Sidoarjo. *E-Jurnal Akuntansi*, 2183.
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Maydiyanti, S., Annie, M. P., & Della, H. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Factors That Affect The Quality Of The Financial Statements Of The City Government Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 69–78. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Rizki Afri Mulia. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 1–15.
- Sulastri, D., Abdullah, A. ‘Ala, Fathir, K., & Casilam, C. (2022). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(2), 80–88. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i2.173>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>
- Astuti, Runik. (2023). Kompas.id. Didakwa Terima Gratifikasi Rp 44 Miliar, Saiful Ilah Keberatan. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/10/didakwa-terima-gratifikasi-rp-44-miliar-saiful-ilah-keberatan>. (Diakses pada 25 November 2023)
- Kpk.go.id (2023). Kpk Kembali Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka Gratifikasi. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3004-kpk-kembali-tetapkan-bupati-sidoarjo-sebagai-tersangka-gratifikasi>. (Diakses pada 25 November 2023)
- Pemkab.Sidoarjo. <https://www.sidoarjokab.go.id/>. (Diakses pada 26 November 2023)